BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bab akhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Gerakan Perempuan di Korea Selatan 1990-2015: Penyelesaian Isu *Jeongshindae*. Dalam uraian dibawah ini akan menjelaskan terkait hasil kesimpulan dan rekomendasi penelitian bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti topik yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pengembang kurikulum pendidikan sejarah dan guru sejarah yang dapat menjadikan muatan sejarah *jūgun'ianfu* dan pergerakan *jeongshindae* sebagai pembelajaran.

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait "Gerakan Perempuan di Korea Selatan 1990-2015: Penyelesaian Isu *Jeongshindae*" dapat ditarik beberapa kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya gerakan *jeongshindae* ialah karena baik ketika sistem *jūgun'ianfu* itu terjadi ketika masa pendudukan Jepang khususnya di Semenanjung Korea maupun langsung setelah hal ini berakhir tidak memerhatikan reparasi bagi penyintas meskipun telah terdapat Pengadilan Perang di Tokyo 1946 dan Perjanjian Dasar Korea Selatan-Jepang 1965.

Kedua, dalam proses terjadinya pergerakan dilatar belakangi secara langsung oleh struktur patriarki di Korea Selatan mulai dari aspek sosial, budaya, dan politiknya. Namun, pengaruh Barat dan suara-suara penyintas yang telah terdokumentasikan meskipun tidak begitu komprehensif sudah cukup mendorong perkembangan embrio pergerakan yang dipelopori oleh Yun Chung-Ok dan *Korean Church Women United.* Pada perkembangannya diikuti oleh organisasi non-pemerintah perempuan lainnya kemudian bersatu membentuk organisasi advokasi *Korean Council.* Agenda isu *jeongshindae* sebagai sistem perbudakan seksual militer Jepang mulai dilancarkan melalui tuntutan *jeongshindae.* Penyintas sebagai pemeran utama dalam pergerakan ini dimunculkan ke publik yang ditandai dengan kesaksian Kim Hak-Sun pada 14 Agustus 1991. Hal ini menimbulkan kegemparan mulai dari penolakan pemerintah Jepang yang menjadi bumerang karena sikapnya

Ernasari, 2022
GERAKAN PEREMPUAN DI KOREA SELATAN 1990-2015: PENYELESAIAN ISU JEONGSHINDAE
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membuat pengungkapan fakta semakin jelas dengan peran media dan sejarawan serta pergerakan meluaskan jaringannya menjadi transnasional untuk mendapat dukungan PBB dalam melancarkan agenda utamanya agar menjadi tekanan bagi pemerintah Jepang dalam mengakui kesalahannya terhadap penyintas.

Ketiga, akibat dari pergerakan yang dilakukan dan berbagai tekanan yang timbul mengubah posisi kebijakan pemerintah Jepang yang asalnya menolak menjadi mengakui keterlibatan. Namun hal ini malah menimbulkan konflik karena pemegang kekuasaaan di pemerintah Jepang sendiri didominasi oleh kaum neo-nasionalis konservatif yang tidak menginginkan harkat dan martabat negara Jepang buruk akibat adanya masalah ini, terutama dalam revisi buku teks sejarah di sekolah-sekolah Jepang dan *Asian Women's Fund.* Indikasi penolakan yang terjadi lagi ini kembali menjadi bumerang bagi Jepang, sehingga rekomendasi-rekomendasi terus diberikan oleh PBB dan gerakan *jeongshindae* dengan dukungan organisasi advokasi di Jepang yakni VAWW NET-Japan maju ke tahap agar Jepang memberikan pertanggungjawaban secara hukum.

Keempat, sebagai hasil dari gerakan transnasional di AS yang dilakukan *Washington Coalition for Comfort Women Issue* (WCCW) dengan melobi Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat berhasil meluncurkan sebuah resolusi. Meskipun terdapat harapan dari Partai Demokrat Jepang (DPJ), hal ini tidak terwujud karena kekuasaan politik Jepang kembali diambil alih oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) sehingga penolakan dari Jepang kembali terjadi dengan ketegangan yang semakin memanas. Mengingat adanya urgensi untuk kembali memperbaiki hubungan diplomasi agar dapat memenuhi kepentingan nasional, dengan kendali dari pemerintah Amerika Serikat tercapai kesepakatan dalam Perjanjian Korea Selatan-Jepang 2015. Dengan demikian, isu kembali menjadi penyelesaian normalisasi hubungan diplomatik sebagaimana Perjanjian Dasar 1965. Namun, melihat respon penyintas dan aktor pergerakan secara umumnya yang menolak perjanjian ini menandakan bahwa tuntutan *jeongshindae* tidak terpenuhi. Berbagai bentuk penolakan pun dipatahkan karena perjanjian ini merupakan keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, pemerintah Jepang belum mengakui secara tulus dan benar mengenai sistem

perbudakan seksual *jūgun'ianfu* dan penyintas tidak mendapatkan hak yang pantas sebagai korban.

5.2 Implikasi

Peneliti memberikan beberapa implikasi yang dapat diterapkan berkaitan dengan hasil temuan dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

5.2.1 Untuk Pemerintah Korea Selatan dan Jepang

Hasil dari temuan penelitian ini yakni penyelesaian isu *jeongshindae* tidak tercapai sebagaimana mestinya. Sehingga diharapkan bahwa penyelesaian yang tidak berhasil ini untuk kedepannya agar pemerintah Korea Selatan dan Jepang lebih melibatkan dan mengutamakan penyintas. Selain itu, berupaya untuk mengesampingkan kepentingan lain pada masing-masing pemerintah agar tidak kembali merugikan penyintas.

5.2.2 Untuk Aktor Pergerakan Korban *Jūgun'ianfu* di Indonesia

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa terdapat pergerakan korban *jūgun'ianfu* di negara pendudukan Jepang lainnya, khususnya Indonesia. Merefleksikan strategi gerakan *jeongshindae* dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi dorongan kuat bagi organisas-organisasi dan penyintas di Indonesia agar dapat memperjuangkan hak-hak korban *jūgun'ianfu.* Dalam artian, tidak cukup hanya dengan menerima kompensasi namun menuntut agar Jepang bertanggungjawab secara resmi dan mengajarkan tentang sejarah *jūgun'ianfu* di Indonesia sebagai pembelajaran bagi generasi muda. Dengan demikian, penderitaan penyintas dan sejarah *jūgun'ianfu* tidak akan dilupakan begitu saja.

5.2.3 Untuk Edukasi Sejarah dan Gender

Dari hasil temuan penelitian ini dapat menjadi implikasi dalam aspek kampanye atau edukasi yang mengangkat isu gender dan menjadikan kasus yang pernah terjadi dalam sejarah sebagai pembelajarannya. Dalam penelitian ini, sistem *jūgun'ianfu* menggambarkan bahwa ketika kolonial Jepang sebagai pelaku tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan agama, maka yang terjadi adalah kekacauan yang dampaknya terasa oleh perempuan Korea sebagai korban, karena saat itu hak dan perannya tertindas. Dengan

demikian, pendidikan seksual dan gender berbasis moral dan agama penting untuk disebarluaskan sehingga dapat menjadi upaya preventif kekerasan seksual terhadap perempuan.

5.3 Rekomendasi

Setelah melalui prosedur penelitian dan metode sejarah untuk memperoleh hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut.

5.3.1 Kepada Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan maupun bahan pengembangan terkait gerakan *jeongshindae*. Jika terdapat peneliti yang berminat mengkaji topik serupa, maka akan lebih baik mengkajinya secara komprehensif. Dalam bentuk pergerakan juga dapat diperluas ke aspek budaya kontemporer seperti *hallyu* atau *korean wave* yang muncul pada film, drama korea, dan seni hiburan lainnya yang mengangkat sejarah dan gerakan *jeongshindae* untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat.

5.3.2 Kepada Guru Sejarah

Gerakan *jeongshindae* dapat menjadi muatan materi dalam pembelajaran sejarah di sekolah untuk Kompetensi Dasar 3.6 yaitu "Menganalisis pengaruh PD I dan PD II terhadap kehidupan politik, sosial-ekonomi dan hubungan internasional (LBB, PBB), pergerakan nasional dan regional" Gerakan *jeongshindae* dapat menjadi contoh pergerakan nasional yang dilakukan oleh kaum perempuan akibat dari perbudakan seksual terhadap perempuan untuk menunjang kebutuhan tentara Jepang dalam Perang Dunia II. Dalam penyelesaiannya akan berkaitan dengan hubungan internasional dan peran lembaga hak asasi manusia internasional sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ikut serta menangani permasalahan ini.